

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta

B.N. Marbun, 1982, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Rajawali Press, Jakarta.

Harbani Pasolong, 2019, *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Isnaini Rodiyah, Hendra Sukma dan Lailul Mursyidah, 2021, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, Umsida Press, Sidoarjo.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Cetakan Kedua Belas, Rajawali Pers, Depok.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

_____, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Visi Media, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Mohamad Hidayat Muhtar. Et. Al. 2024, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Patrialis Akbar, 2015, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: 02/HM.04/05/2024.

C. Jurnal, Makalah, dan Skripsi

Alfonso D.K. Tahapary, 2011, *“Penggunaan Hak Interpelasi Sebagai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Setelah Amandemen UUD Tahun 1945”*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Alvin Nanda Sasmita dan Tjitjik Rahayu, 2023, *“Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*, Jurnal Publika, Vol. 11, No. 2, hlm. 1727.

Andi Heny Mulawati Nurdin, 2018, *“Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government”*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 5, No. 1, 2018.

Antoinette Ordain Setlight, 2017, *“Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 4. 2017.

Babby Apriandani, Sumantri, dan Sofian, 2025, *“Urgensi DPR RI Dalam Fungsi Pengawasan Anggaran Di Indonesia”*, *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8, No. 2,

Dewi Amanatun Suryani, 2017, *“Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik”*, Jurnal Spirit Publik, Vol. 12, No. 1, 2017.

Dinoroy Marganda Aritonang, 2010, *“Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945”*, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010.

Edwin Nurdiansyah, 2016, *“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 3, No. 2, 2016.

I Gede Sujana, 2024, *“Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945”*, Indonesian of Journal Law Research, Vol. 2., No, 1, 2024.

I Gusti Ketut Aryawan, 2013, *“Metode Penelitian Hukum Normatif”*, Jurnal Hukum Kerta Widya, Vol. 1, No. 1, 2013.

Khairunnisa Kamaliah, 2015, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda”*, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. 2015.

Mohd. Mahfud MD, 1999, *“Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance”*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional

Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15 Oktober 1999.

Muhammad Usman Noor, 2019, *“Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang KIP”*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 7, No. 1, 2019.

Mutiara Putri, Et. Al., 2025, “Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2,

Nunuk Febrianingsih, 2012, *“Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2012.

Ofis Rikardo, 2020, *“Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6, No. 1, 2020.

Putu Eva Ditayani Antari, 2020, *“Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”*, Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2020.

Sintia Kartini Haniandaresta, Et. Al., 2023, *“Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*, Jurnal Media Administrasi, Vol. 8, No. 1., 2023

Sunarto, 2017, *“Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945”*, Integralistik, Vol. 28, No. 1, 2017.

Sutoyo, 2016, *“Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD), disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 2016, hlm. 4.

D. Internet

Bayu Septianto, “Menhan Prabowo Menolak Saat Didesak DPR Soal Transparansi Anggaran”, [Menhan Prabowo Menolak Saat Didesak DPR Soal Transparansi Anggaran \(tirto.id\)](https://tirto.id/Menhan-Prabowo-Menolak-Saat-Didesak-DPR-Soal-Transparansi-Anggaran),

Indonesian Parliamentary Center , “Reformasi Tata Kelola Publik di DPR RI”, [Reformasi Tata Kelola Informasi Publik di DPR RI – Indonesian Parliamentary Center \(ipc.or.id\)](https://ipc.or.id/Reformasi-Tata-Kelola-Informasi-Publik-di-DPR-RI),

Library Of Congress, [About this Collection | James Madison Papers, 1723-1859 | Digital Collections | Library of Congress](https://www.loc.gov/about-this-collection/james-madison-papers-1723-1859/)

PPID RSJD Soedjarwadi, “Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, [Tentang Keterbukaan Informasi Publik \(jatengprov.go.id\)](https://jatengprov.go.id/Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik),

Rini Kustiasih, “Saat Rapat DPR yang diakui terbuka, tetapi tak bisa diakses dari Publik”, [Saat Rapat DPR yang Diakui Terbuka, Tetapi Tak Bisa Diakses dari Publik - Kompas.id](https://kompas.id/Saat-Rapat-DPR-yang-Diakui-Terbuka-Tetapi-Tak-Bisa-Diakses-dari-Publik),

Tempo.co, “Mahfud MD Sebut Soal Anggaran Pertahanan Negara Bukan Rahasia Negara”, [Mahfud Md Sebut Soal Anggaran Pertahanan Bukan Rahasia Negara - Nasional Tempo.co](https://nasional.tempo.co/Mahfud-Md-Sebut-Soal-Anggaran-Pertahanan-Bukan-Rahasia-Negara),

Tim Hukum Online, “Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR”, [Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com/Tugas-dan-Fungsi-Legislasi-Anggaran-dan-Pengawasan-DPR),